



Strategi Korem 033/Wira Pratama dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Wabah Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Penanggulangan Wabah Tahun 2020–2023)

The Strategy of the 033rd Military Resort Command (Wira Pratama) in Responding to Non-Military Threats of Infectious Disease Outbreaks in the Riau Islands Province: A Case Study of Epidemic Management During 2020–2023

Zusnan Hadi Hudaya^{1*}, Sigit Purwanto², Ferdinand Hasudungan Siagian³

^{1*}zusnan_hudaya@gmail.com

¹Universitas Pertahanan, ² Universitas Pertahanan, ³Universitas Pertahanan

* email penulis/koresponden: zusnan_hudaya@gmail.com

Abstract. *The Covid-19 pandemic has emerged as a non-traditional threat with broad impacts on social, economic, and national security, particularly in archipelagic regions such as the Riau Islands Province. Korem 033/Wira Pratama, as a territorial unit of the Indonesian Army, plays a pivotal role in Military Operations Other Than War (MOOTW), supporting pandemic mitigation efforts in the region. This study aims to analyze the nature of the Covid-19 threat in Riau Islands, assess the roles and responses of Korem 033/WP, and examine the strategies implemented to enhance pandemic response effectiveness. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, using in-depth interviews, field observations, and document analysis. Findings reveal that Korem 033/WP faced considerable challenges, including limited healthcare infrastructure, complex logistics distribution, and insufficient personnel capacity in digital and public health domains. Nonetheless, through a territorial approach and cross-sectoral coordination, Korem successfully established integrated task forces, significantly increased vaccination coverage, and implemented community-based education and socio-economic resilience programs. The strategies were analyzed using the POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) framework and the Ends-Ways-Means model, showing a coherent alignment between objectives, methods, and available resources. In conclusion, Korem 033/WP has transformed into a key actor in pandemic mitigation in frontier and archipelagic areas, although further institutional capacity-building, contingency budgeting, and integrated intersectoral policy support are still required.*

Keywords: *Korem 033/Wira Pratama, Covid-19, Mitigation Strategy, Riau Islands.*

Abstrak. *Pandemi Covid-19 telah menjadi ancaman non-tradisional yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, khususnya di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Korem 033/Wira Pratama sebagai satuan kewilayahan TNI AD memainkan peran penting dalam Operasi Militer Selain Perang*

(OMSP) untuk mendukung upaya penanggulangan pandemi di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ancaman pandemi di wilayah Kepri, mengevaluasi peran dan respons Korem 033/WP dalam penanganannya, serta mengkaji strategi yang diterapkan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korem 033/WP menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan sarana-prasarana, distribusi logistik yang kompleks, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam konteks digital dan kesehatan masyarakat. Namun, melalui pendekatan teritorial dan sinergi lintas sektoral, Korem berhasil membentuk gugus tugas terpadu, meningkatkan cakupan vaksinasi secara signifikan, serta menjalankan program edukasi dan ketahanan sosial-ekonomi berbasis komunitas. Strategi Korem dianalisis menggunakan model POAC dan Ends-Ways-Means yang menunjukkan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumber daya yang dimiliki. Kesimpulannya, Korem 033/WP mampu bertransformasi menjadi aktor kunci dalam mitigasi pandemi di wilayah perbatasan dan kepulauan, namun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran kontinjensi, dan integrasi kebijakan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Korem 033/Wira Pratama, Covid-19, Strategi Penanggulangan, Kepulauan Riau.

1. Pendahuluan

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI beserta seluruh isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Penyelenggaraan sistem pertahanan tidak hanya ditujukan untuk perang, tetapi juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin kelancaran pembangunan nasional.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang dinamis saat ini memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika tersebut berdampak pada munculnya ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, meliputi ancaman militer, ancaman nirmiliter, dan ancaman hibrida. Berdasarkan Kementerian Pertahanan RI (2015), ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai

ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Untuk mengantisipasi hal ini, TNI melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di semua level organisasi dan strata kewilayahan. Pada lingkup TNI Angkatan Darat (TNI AD), fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan diperankan oleh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang meliputi Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Satkowil harus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan elemen masyarakat guna membangun ketahanan wilayah.

Salah satu bentuk ancaman nirmiliter yang menuntut peran aktif TNI adalah wabah penyakit menular berskala luas, seperti pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pandemi ini, menurut WHO, pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, diikuti dengan kebijakan mitigasi di tingkat nasional maupun daerah. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat resiko terhadap pandemi Covid-19. Dalam perspektif pertahanan negara, pandemi Covid-19 termasuk ancaman strategis kategori bencana biologis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, yang memandatkan respons sinergis antara unsur militer dan sipil.

Leading sector penanggulangan akibat pandemi Covid-19 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). TNI berperan aktif bersama instansi/lembaga terkait membantu BNPB dalam penanggulangan akibat pandemi Covid-19. Kesiapan yang dimiliki TNI di dalam penanggulangan akibat pandemi Covid-19 merupakan manifestasi dari kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki, serta kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan. Akan tetapi kesiapan TNI dalam membantu penanggulangan akibat pandemi Covid-19 masih belum optimal. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya kesiapan tersebut.

Korem 033/Wira Pratama (WP) sebagai Satkowil TNI AD yang membawahi wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam pemberdayaan wilayah pertahanan darat untuk menghadapi ancaman nirmiliter tersebut. Wilayah Kepri memiliki karakter strategis: berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam; dilalui jalur pelayaran internasional; serta menjadi pintu gerbang keluar-masuk manusia dan barang. Kepri juga menjadi salah satu titik rawan pelintas batas ilegal (*illegal border crossers*) melalui jalur laut, baik oleh pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural maupun warga negara asing, yang berpotensi membawa virus ke wilayah Indonesia. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) mencatat, selama 2020–2021 terdapat lebih dari 5.000 PMI non-prosedural yang dipulangkan melalui pelabuhan resmi dan jalur tikus di Kepri. Tingginya arus pelintas batas ini memperbesar risiko penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPS Kepri (2022) dan Dinas Kesehatan Kepri (2022), hingga akhir 2021 tercatat lebih dari 54.000 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dengan tingkat kematian 2,4% dan tingkat kesembuhan 95%. Kota Batam menjadi episentrum penyebaran, diikuti Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Mobilitas penduduk antar-pulau, kedekatan geografis dengan negara tetangga, serta keterbatasan fasilitas kesehatan di pulau-pulau kecil mempercepat transmisi virus di awal pandemi.

Tabel 1. Jumlah Pasien Covid-19 Provinsi Kepri 2021

No.	Kota/ Kabupaten	Kasus Covid-19 (Jiwa)	Pasien Aktif (Jiwa)
1.	Batam	5.872	111
2.	Tanjungpinang	1.356	59
3.	Bintan	623	59
4.	Karimun	416	11
5.	Anambas	103	6
6.	Natuna	90	1
7.	Lingga	53	8
Total		8.513	255

Sumber: <https://corona.kepriprov.go.id/data.phtml> di akses pada 10 Maret 2021

Secara normatif (*das sollen*), peran Korem 033/WP dalam kondisi ini diatur oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat 2 angka 8 dan 9, yang memandatkan TNI membantu pemerintah daerah dalam penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan dan dalam penanggulangan bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Korem diharapkan mampu melaksanakan pembinaan teritorial (*Binter*) yang meliputi pembinaan kemampuan, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, dan pembinaan bakti TNI untuk mendukung ketahanan wilayah menghadapi pandemi.

Namun pada kenyataannya (*das sein*), pelaksanaan strategi penanggulangan Covid-19 oleh Korem 033/WP menghadapi tantangan signifikan, antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, terutama dalam menjangkau pulau-pulau terluar yang sulit diakses.
- b. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dipengaruhi hoaks dan disinformasi.
- c. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, baik antar instansi pemerintah maupun dengan organisasi non-pemerintah.
- d. Keterbatasan anggaran operasional dan dukungan teknologi informasi, sehingga menghambat manajemen data dan komunikasi lapangan.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah strategi terintegrasi yang menggabungkan kekuatan militer, pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat lokal dalam pola *community-based defense*. Strategi tersebut mencakup sistem deteksi dini, pengamanan jalur perbatasan, distribusi logistik dan vaksin secara merata, peningkatan literasi kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan merespons situasi secara cepat.

Jika kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini tidak segera diatasi, dampaknya antara lain: meningkatnya risiko gelombang baru Covid-19 dari pelintas batas, berkurangnya kepercayaan publik terhadap efektivitas penanggulangan

pandemi, dan melemahnya ketahanan wilayah Kepri sebagai daerah strategis perbatasan negara.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi Korem 033/Wira Pratama dalam menghadapi ancaman nirmiliter wabah penyakit menular di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dalam studi kasus penanggulangan Covid-19 periode 2020–2023. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi langkah strategis yang telah dilaksanakan, mengevaluasi efektivitasnya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, dan keamanan di wilayah Kepri.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Manajemen. Menurut (Terry, 2010) mengatakan bahwa manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu- individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak terwujud (*Intangible*).

Teori Strategi. Strategi diartikan sebagai perencanaan untuk memimpin suatu kekuatan perang agar dapat memenangi pertempuran. Strategi merupakan komponen dari *ends*, *means*, dan *ways*. Penjelasananya adalah *ends* merupakan tujuan, *means* merupakan sarana mencapai tujuan tersebut, dan *ways* yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. (Lykke, 1989) Pembentukan strategi disesuaikan dengan tujuan nasional sebuah negara. Tujuan ini biasanya berhubungan dengan pencapaian tujuan politik negara (*ends*). Dalam melakukan upaya pencapaian diperlukan cara dalam meraih tujuan tersebut (*ways*). Cara tersebut tentu harus di dukung dengan sumber daya yang dapat digunakan dan dikembangkan sebagai bentuk dari sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan tersebut (*means*).

Teori Manajemen Strategi. Manajemen Strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi (Nawawi, 2012).

Konsep Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan umum pertahanan negara dirumuskan melalui pertimbangan yang didasari oleh pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Kebijakan umum pertahanan negara mengacu pada visi dan misi Pemerintah yang diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, maka strategi pertahanan negara yang mencakup tujuan, sasaran strategis, dalam mencapai sasaran dan sumber daya pertahanan untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif dan berdaya tangkal tinggi. Pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional, termasuk kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan negara guna mendukung pertahanan maritim yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi satelit dan *sistem drone* (Kemenhan RI, 2015:24).

Konsep Sistem Pertahanan Negara. Sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sebagaimana tertuang dalam buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015, sistem pertahanan negara memiliki tatanan, dimana unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dengan memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas pertahanan negara. Menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara.

Teori Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Pemberdayaan menekankan aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki (Anwas, 2019, p. 49). Selanjutnya pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana meliputi wilayah daratan, maritim dan dirgantara. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan yang tangguh. Oleh karena itu, Pemberdayaan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme dan peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nirmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman, didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa. TNI sebagai unsur Lain Kekuatan Bangsa dipersiapkan secara terpadu untuk mendukung K/L dan Pemda dalam pertahanan nirmiliter.

Pandemi Covid 19 sebagai bencana non-alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana non-alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. Di dalam buku Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2014) disebutkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan permukiman yang kurang terkendali serta tingginya perkembangan teknologi menimbulkan potensi tinggi terjadinya bencana antropogenik yaitu epidemic dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Tidak hanya itu faktor ekonomi global juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan potensi bencana non-alam semakin tinggi. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi global yang diikuti dengan

peningkatan intensitas keluar masuk manusia berpotensi meningkatkan kejadian epidemik dan wabah penyakit seperti HIV/AIDS. Ebola dan MERS. Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Terdapat sedikit perbedaan dengan klasifikasi WHO, yaitu kasus suspek disebut dengan Pasien dalam Pengawasan (PdP) dan ada penambahan Orang dalam Pemantauan (OdP). Istilah kasus *probable* yang sebelumnya ada di panduan Kemenkes RI dan ada pada panduan WHO saat ini sudah tidak ada.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan analisis deskriptif kualitatif, merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Desain penelitian studi kasus. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Strategi Korem 033/Wira Pratama dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Wabah Penyakit Menular di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan studi kasus penanggulangan Covid-19 pada kurun waktu 2020–2023.

Desain studi kasus digunakan untuk memusatkan kajian pada satu unit analisis, yaitu Korem 033/Wira Pratama, sebagai contoh konkret penerapan strategi pertahanan dalam penanggulangan wabah penyakit menular. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena secara sistematis dalam kondisi nyata tanpa memberikan perlakuan atau intervensi terhadap variabel yang diamati. Sebagaimana dinyatakan Malik (2016), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan status gejala pada saat penelitian berlangsung secara apa adanya, baik dengan maupun tanpa pengujian hipotesis, sehingga relevan untuk memahami strategi penanggulangan Covid-19 secara menyeluruh.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan *Covid-19*. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut Huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* (Ren, et.al., 2020).

Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan pada 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan *Covid-19* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus *Covid-19* berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *Covid-19* ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan *Covid-19* ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, *Covid-19* dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *Covid-19* termasuk yang merawat pasien *Covid-19* (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari *Covid-19* global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko

Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi *Covid-19* di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi *Covid-19* di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas (WHO, 2020).

WHO mengumumkan *Covid-19* pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic *Covid-19* pada tanggal 26 Maret, yang terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan *coronavirus*; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus (WHO, 2020).

Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran *Covid-19* ini, dan dampak global dari infeksi virus ini adalah salah satu yang semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemic ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19* ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan masal (Buana, 2020).

4.2 Peran TNI dalam Penanganan Covid-19

Tingginya kasus pandemi *Covid-19* menunjukkan bentuk ancaman tidak hanya berupa ancaman militer yang menyerang kedaulatan negara tetapi juga berupa wabah penyakit yang mengancam keamanan manusia (Kerr, 2010:124). Dalam konsep keamanan manusia, keamanan nasional juga perlu menjamin kehidupan manusia di dalamnya, termasuk melindungi warga negara dari wabah penyakit. Penanganan wabah penyakit yang dampaknya telah meluas ataupun bencana secara umum membutuhkan penanganan yang koordinatif dari berbagai sektor, salah satunya militer.

Sejak awal TNI terlibat aktif dalam upaya penanganan *Covid-19*. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak *Covid-19* di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga penjagaan akses perbatasan (Kompas, 15 April 2020). Dalam penanganan *Covid-19*, pelibatan TNI pada dasarnya serupa dengan operasi pengamanan maupun tanggap darurat bencana. Jauh sebelumnya, pelibatan TNI dalam penanganan bencana cenderung meningkat karena kesiapsiagaan militer dalam tanggap darurat bencana baik dari segi personil, materiil, alat transportasi, komando dan pengendalian serta kecepatan gerak dibanding instansi lainnya.

Secara umum, pelibatan TNI termasuk ke dalam mekanisme tugas perbantuan dalam kerangka OMSP. OMSP adalah serangkaian operasi militer di luar peperangan dalam skema perbantuan terhadap otoritas sipil berdasarkan kompleksitas ancaman yang diatur secara ketat melalui legislasi. Pelaksanaan OMSP merupakan respons organisasi militer terhadap situasi kritis atau darurat ketika otoritas sipil memiliki keterbatasan dalam penanganannya. Peningkatan peran TNI melalui OMSP semakin terlihat seiring menurunnya ancaman tradisional atau militer perang di Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Pelibatan militer sebagai bagian dari upaya penanganan *Covid-19* juga dilakukan oleh banyak negara di dunia. Di Inggris, dalam mendukung kebijakan lockdown, 20.000 tentara diturunkan untuk menangani wilayah seluas 242.495 km² (Maharani & Jauhari, 2020:3). Pelibatan militer ini didasarkan pada ketentuan dalam *Military Aid to The Civil Authority (MACA)*. Di Amerika Serikat (AS), pelibatan militer dilaksanakan sebagai penguatan otoritas sipil yaitu *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* dan *Department of Health and Human Services (HHS)*. Penggunaan instrumen militer ini mengacu pada doktrin *Defense Support for Civilian Authorities* (Cancian, 2020). Ketika dampak pandemi semakin meningkat, AS menerapkan Undang-Undang Produksi Pertahanan yang memungkinkan negara untuk memobilisasi industri swasta seperti *Ford*, *General Motors* dan *Tesla* dalam memproduksi ventilator untuk memenuhi krisis alat kesehatan (Reuters.com, 22 Maret 2020).

Pengeralahan kekuatan militer diturunkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada spektrum ancaman, kesiapan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penting digarisbawahi, pelibatan militer didasarkan pada perbantuan terhadap otoritas sipil dalam konteks OMSP serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Huntington, bahwa pelaksanaan OMSP didasarkan pada penguatan kapasitas sipil dan diatur secara terperinci dalam legislasi.

4.3 Korem 033/Wira Pratama

Komando Resor Militer 033/Wira Pratama (disingkat Korem 033/WP) adalah satuan kewilayahan TNI AD di bawah Kodam I/Bukit Barisan. Markasnya berada di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Korem ini dibentuk berdasarkan SK KASAD Nomor Kep/67/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005, dan resmi berdiri pada 19 September 2006 setelah ditandatangani Pangdam I/BB melalui Sprint No. Sprint/1132/VII/2006. Wilayah dan Satuan: Korem membawahi empat Kodim:

- a. Kodim 0315/Tanjungpinang di P. Bintan
- b. Kodim 0316/Batam di Batam
- c. Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun

d. Kodim 0318/Natuna di Natuna

Jumlah total Koramil mencapai 34 unit yang tersebar di wilayah Kepri, serta ditopang oleh Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti. Sebagai bagian dari Kodam I/Bukit Barisan, Korem 033/WP memiliki tugas antara lain:

- a. Pembinaan teritorial, yaitu mengaktifkan potensi wilayah geografis dan sosial menjadi kekuatan pertahanan darat.
- b. Pembinaan kekuatan personel dan sumber daya TNI AD serta kesiapan operasi pertahanan.
- c. Pelaksanaan operasi pertempuran dan keamanan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau

Di website resmi, Korem 033/WP menekankan visi-misi untuk mewujudkan kekuatan teritorial yang profesional, sinergis dengan masyarakat, dan siap menghadapi ancaman yang meliputi aspek keamanan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana atau wabah. Korem aktif berkoordinasi dengan Pemda maupun instansi lain, seperti mengikuti rapat koordinasi Pemprov Kepri dan BP Batam untuk proyek strategis nasional, termasuk program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Korem rutin menyelenggarakan komunikasi sosial (Komsos) baik virtual dan tatap muka dengan pemerintah daerah, keluarga besar TNI dan masyarakat untuk memperkuat hubungan serta sinergi dengan komunitas lokal.

4.4 Kondisi penanggulangan Korem 033/Wira Pratama menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Peran Korem 033/Wira Pratama dalam penanggulangan COVID-19 berada dalam ranah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 2, khususnya poin ke-12: “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.” Penugasan ini juga dikuatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa TNI merupakan salah satu unsur pelaksana penanggulangan bencana bersama BNPB, BPBD, dan instansi lainnya.

Konsep koordinasi sipil-militer atau *Civil-Military Coordination* (CIMIC) yang diusung oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), menekankan pada pentingnya sinergi antara militer dan aktor sipil dalam merespons bencana dan krisis kemanusiaan. CIMIC mendefinisikan prinsip "support, not substitute", yang berarti kehadiran militer harus memperkuat kapasitas sipil, bukan menggantikannya.

Implementasi Korem 033/WP dalam membentuk Gugus Tugas COVID-19 dan pusat komando wilayah (Puskodal) merupakan manifestasi dari sistem Command, Control, Communication & Information (C3I) yang mendukung efektivitas OMSP. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin TNI AD Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), sistem C3I merupakan tulang punggung dalam mewujudkan interoperabilitas dan integrasi vertikal serta horizontal antara satuan teritorial dan pemangku kepentingan sipil.

a. Kebijakan

Selain dasar hukum nasional seperti UU No. 24/2007 dan Keputusan Presiden No. 12/2020, terdapat sejumlah peraturan lokal di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi landasan operasional pelaksanaan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020, tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pergub ini telah menetapkan standar hukum, mekanisme sosialisasi, monitoring, evaluasi, maupun sanksi administrasi yang berlaku di daerah dan menjadi acuan bagi Gugus Tugas Daerah, TNI/Polri, serta aparat desa dalam melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di Kepri.

Kemudian, untuk menyesuaikan terhadap varian baru seperti Omicron dan kebutuhan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, Pergub tersebut diperbarui melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022. Perubahan ini mencakup revisi pasal tentang ketentuan sanksi, sosialisasi, serta mekanisme evaluasi, dengan memasukkan

penambahan ketentuan Pasal 6A untuk memperkuat pelaksanaan protokol berbasis digital dan integrasi sistem verifikasi kesehatan masyarakat.

DPRD Provinsi Kepri juga pernah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19, agar pendistribusian sanksi dan pendekatan hukum bisa lebih efektif. Rencana tersebut disambut positif, dan diharapkan menjadi perda pertama di Kepri yang memberikan payung hukum bagi penegakan tindakan lokal terhadap pelanggaran protokol serta peran institusi seperti Korem dalam membantu stabilitas wilayah.

Dalam penerapannya, keberadaan Pergub dan Ranperda ini sangat berperan dalam memastikan bahwa Korem 033/WP dan Kodim jajaran memiliki panduan operasional yang jelas ketika memberlakukan PPKM, mendukung kegiatan pengawasan publik, melakukan sosialisasi disiplin kesehatan, serta memfasilitasi koordinasi dengan Pemda dan Gugus Tugas Covid-19 Daerah. Regulasi lokal ini menjadi dasar legitimasi tindakan militer teritorial dalam konteks bantuan sosial, edukasi masyarakat, dan pengamanan kegiatan selama pandemi.

Namun, wawancara dengan personel Korem 033/WP mengindikasikan bahwa meskipun regulasi lokal sejatinya telah tersedia, tingkat sosialisasi pada masyarakat umum masih terbatas, terutama di pulau-pulau terpencil. Di sana warga sering belum memahami sanksi administratif atau ketentuan protokol yang berlaku. Korem dan Babinsa sering menjadi ujung tombak sosialisasi, tetapi belum didukung sistem hukum lokal yang memadai untuk penegakan konsisten di tingkat desa atau kelurahan.

Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi dalam bentuk Pergub dan perda, perlu penyusunan petunjuk teknis implementasi yang lebih rinci maupun pelatihan bersama lintas sektoral. Ini diperlukan agar Korem 033/WP mampu memanfaatkan kewenangan yang diberikan secara optimal, dan operasional penegakan hukum menjadi efektif serta selaras dengan kebijakan nasional.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Ketangguhan dalam menghadapi krisis kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana-prasarana, tetapi juga oleh kesiapan personel yang terlibat di lapangan. Dalam konteks Korem 033/Wira Pratama, keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana non-alam sangat bergantung pada kapasitas SDM satuan kewilayahan dan sinergi dengan komponen masyarakat lokal, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

Hasil wawancara dengan sejumlah personel Korem 033/WP dan Babinsa di wilayah Kodim jajaran menunjukkan bahwa struktur SDM di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek integrasi lintas sektor dan keterbatasan pelatihan teknis terkait penanganan pandemi. Meskipun aparat Korem dan Babinsa telah aktif dalam berbagai tugas seperti tracing, edukasi masyarakat, pengawalan vaksinasi, hingga distribusi bantuan sosial, namun banyak dari mereka belum mendapatkan pelatihan formal dalam bidang pelayanan publik darurat, manajemen data kesehatan, dan komunikasi risiko. Kualifikasi yang diperlukan mencakup kemampuan komunikasi tatap muka yang efektif di tingkat komunitas, manajemen dasar pelayanan publik, fasilitasi masyarakat, hingga keterampilan menjembatani koordinasi antara kepala desa, RT/RW, dan Babinsa.

Dalam konteks ketangguhan wilayah menghadapi pandemi, peran petugas pemulasaraan jenazah dan penyedia logistik kesehatan di wilayah Korem juga sangat signifikan. Penanganan jenazah Covid-19 memerlukan prosedur berbeda dibanding kematian biasa, namun sebagian besar petugas lapangan belum dibekali pengetahuan dan perlengkapan khusus. Fasilitas seperti thermo gun, masker, tempat cuci tangan, rumah isolasi desa, dan alat pelindung diri, pada awalnya sangat terbatas dan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Beberapa Babinsa di lapangan melaporkan bahwa partisipasi masyarakat di daerah pesisir dalam menyediakan alat pelindung dasar dilakukan secara swadaya, menunjukkan bahwa adaptasi lapangan berjalan cepat, namun tidak sepenuhnya didukung oleh sistem pelatihan dan logistik resmi.

Pelibatan personel Korem 033/Wira Pratama dalam operasi penanggulangan pandemi sangat berdampak terhadap kecepatan respons di daerah-daerah terpencil.

Hal ini sesuai dengan pandangan Wong (2020) yang menyatakan bahwa ketersediaan personel secara cepat dan terlatih menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanganan krisis non-tradisional seperti pandemi. Namun demikian, Korem 033/WP menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, khususnya dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan dasar kesehatan masyarakat.

c. Pengetahuan dan Keterampilan Penanggulangan Bencana Non-Alam

Kemampuan personel TNI di wilayah Korem 033/Wira Pratama dalam penanggulangan pandemi masih perlu diperkuat dengan pelatihan sistematis. Pengetahuan tentang protokol kesehatan, isolasi mandiri, pengelolaan logistik medis, serta keterampilan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sangat penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar Babinsa memahami dasar-dasar protokol kesehatan, namun masih terbatas dalam kemampuan teknis seperti pencatatan kasus, manajemen distribusi bantuan, serta dokumentasi data harian. Selain itu, keterampilan non-medis seperti komunikasi sosial, fasilitasi kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas), dan pendampingan psikososial, juga masih kurang dimiliki. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberadaan Babinsa dan personel Korem di masyarakat seringkali menjadi rujukan utama dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, pelatihan terintegrasi lintas sektor bersama Dinkes, BPBD, dan instansi lain sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi ancaman non-alam seperti pandemi.

d. Penguasaan Teknologi Informasi (IT)

Penguasaan teknologi informasi menjadi hal penting dalam mendukung respons cepat dan akurat terhadap pandemi Covid-19. Di wilayah Korem 033/WP, pemanfaatan aplikasi seperti *PeduliLindungi*, *Bersatu Lawan Covid (BLC)*, dan platform pendataan vaksinasi nasional, masih belum sepenuhnya terintegrasi di tingkat bawah. Banyak personel Babinsa yang hanya memiliki akses terbatas terhadap internet atau perangkat

digital, khususnya di daerah pulau kecil dan daerah blank spot jaringan. Akibatnya, pengumpulan data tracing, distribusi logistik, serta pelaporan kegiatan operasional masih dilakukan secara manual dan tidak real time.

Padahal, sesuai dengan arahan Presiden RI, setiap kebijakan dan strategi penanganan Covid-19 harus berbasis data science dan analisis situasional. Tanpa peningkatan kapasitas dalam penguasaan IT, personel Korem berisiko mengalami ketertinggalan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan pelatihan manajemen data harus menjadi bagian dari penguatan SDM Korem dalam penanggulangan pandemi ke depan.

e. Personal Characteristics

Karakteristik personal (*personal characteristics*) seperti integritas, kepemimpinan lapangan, empati sosial, dan kedisiplinan, menjadi fondasi penting dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi Covid-19. Dalam konteks Korem 033/Wira Pratama, nilai-nilai kejuangan prajurit TNI seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan. Meskipun demikian, di lapangan masih diperlukan pelatihan dalam membangun komunikasi yang adaptif, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat yang rentan atau tidak kooperatif terhadap aturan kesehatan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh personel Korem adalah menjaga keseimbangan antara peran komando dan pendekatan humanis, terutama dalam pengawasan protokol kesehatan di tempat ibadah, pasar tradisional, dan fasilitas umum lainnya. Profesionalisme prajurit dalam konteks pandemi bukan hanya diuji dalam kemampuan taktis, tetapi juga dalam kepekaan sosial, adaptabilitas, dan keterampilan membangun kepercayaan masyarakat. Inilah yang menjadi elemen penting dalam pendekatan pertahanan nirmiliter untuk membangun ketahanan wilayah.

f. Manajemen Logistik

Manajemen logistik merupakan aspek krusial dalam mendukung kelancaran penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam konteks ini, Korem 033/Wira Pratama sebagai satuan kewilayahan TNI AD memiliki peran strategis dalam membantu distribusi logistik kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan terhadap penyediaan cadangan pangan. Penanganan pandemi di wilayah kepulauan seperti Kepri menuntut manajemen logistik yang efisien dan terintegrasi, mengingat tantangan geografis berupa banyaknya pulau kecil yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat logistik Korem 033/WP dan Kodim jajarannya, terdapat tiga sumber utama logistik bantuan yang diterima dan disalurkan di wilayah Kepri, yaitu: bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan Kemenkes, bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta bantuan dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Penyaluran logistik dilaksanakan melalui koordinasi antara Gugus Tugas Daerah dan Korem, di mana Korem bertindak sebagai unsur pendukung dalam pendistribusian hingga ke wilayah-wilayah terpencil, termasuk pengamanan jalur distribusi dan pengawasan langsung di titik distribusi.

g. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Kepri pada awal pandemi tergolong terbatas, terutama dalam hal alat kesehatan seperti masker medis, APD, alat rapid test, dan ventilator. Rumah sakit rujukan di daerah seperti RSUP Raja Ahmad Tabib di Tanjungpinang dan RSUD Embung Fatimah di Batam mengalami lonjakan pasien pada gelombang kedua dan ketiga pandemi. Korem 033/WP turut membantu memperkuat kapasitas dengan mendirikan posko darurat, mendistribusikan peralatan medis dari pusat ke daerah, serta mendukung operasi evakuasi pasien dan jenazah Covid-19. Namun, laporan lapangan menunjukkan bahwa distribusi alat kesehatan kerap terkendala oleh ketersediaan transportasi laut dan kondisi cuaca di pulau-pulau kecil seperti Natuna, Anambas, dan Lingga.

Selain itu, fasilitas kesehatan milik TNI seperti Poskes Kodim dan Rumkitban juga digunakan sebagai pendukung layanan kesehatan masyarakat. Namun demikian, sarana tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dengan kapasitas perawatan pasien Covid-19. Kondisi ini mengharuskan penanganan pasien secara terpusat di rumah sakit pemerintah, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan pada sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan sarana penunjang seperti rumah isolasi desa dan peralatan sanitasi publik sangat dibutuhkan sebagai buffer system untuk mengurangi beban fasilitas rujukan.

h. Cadangan Pangan dan Ketahanan Wilayah

Penyiapan cadangan pangan juga menjadi perhatian utama dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat selama pembatasan sosial dan PPKM berlangsung. Wilayah Kepri sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar bahan pangan bergantung dari luar wilayah, sangat rentan terhadap gangguan distribusi. Dalam konteks ini, Korem 033/Wira Pratama berperan aktif dalam mendorong program ketahanan pangan berbasis komunitas. Inisiatif seperti urban farming, pemanfaatan lahan kosong oleh Babinsa dan masyarakat, serta pendampingan distribusi bantuan beras dan sembako, telah dilakukan di berbagai wilayah seperti Bintan, Tanjungpinang, dan Batam.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa cadangan pangan lokal di tingkat desa atau kelurahan belum terkoordinasi dengan baik. Inisiatif seperti pembentukan Lumbung Pangan Kampung (LPK) yang diadopsi dari model Kampung Tangguh Nusantara masih minim implementasi di Kepri. Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Nongsa (Batam) dan Kecamatan Bunguran Timur (Natuna), sudah memulai pendataan bantuan dan pengelolaan logistik melalui RW/Babinsa, namun belum didukung dengan sistem pencatatan yang rapi. Korem 033/WP telah menginstruksikan Babinsa untuk mendorong pengumpulan data rumah tangga sasaran bantuan serta menciptakan cadangan logistik berbasis komunitas dengan mekanisme transparan dan partisipatif.

Untuk mendukung manajemen pangan berbasis kampung ini, maka diperlukan pokok-pokok aturan setingkat RW atau desa, seperti: pencatatan seluruh bantuan yang masuk, pencatatan nama rumah tangga penerima, pembentukan sistem pengendali distribusi bantuan (papan kendali), hingga tanda tangan penerimaan bantuan. Selain itu, pengaturan komposisi bantuan yang masuk dan tersimpan dalam LPK juga penting agar tidak terjadi kelebihan atau kelangkaan logistik saat kondisi darurat berlangsung. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya konflik sosial akibat ketimpangan distribusi logistik.

Dalam konteks ini, Korem 033/Wira Pratama memiliki peluang strategis untuk menjadi katalisator pembentukan sistem logistik komunitas, dengan mendorong pemerintah desa dan masyarakat membentuk struktur logistik mandiri. Kolaborasi antara Babinsa, perangkat desa, relawan, dan donatur perlu dikuatkan melalui sistem pencatatan dan evaluasi berbasis data lapangan.

Pentingnya dukungan pangan ini juga ditegaskan oleh Gubernur Kepulauan Riau dalam berbagai kesempatan, bahwa sektor pertanian dan perikanan di Kepri harus diperkuat sebagai basis ketahanan wilayah. Korem 033/WP telah merespons hal ini melalui berbagai kegiatan pendampingan warga seperti pelatihan budidaya ikan dalam ember (budikdamber), hidroponik, dan penanaman tanaman cepat panen sebagai strategi darurat pangan selama pandemi dan masa pemulihan.

i. Anggaran

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran APBN khusus untuk penanggulangan pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2020. Namun, pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau, penyaluran dan pemanfaatan anggaran kontinjensi masih mengalami tantangan signifikan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas Korem 033/Wira Pratama di wilayah kepulauan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri merealokasi anggaran APBD tahun 2020 melalui skema biaya tak terduga (BTT), dari

Rp 40 miliar menjadi total sekitar Rp 230 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19.

Rincian alokasi awal sebagian dialokasikan kepada Dinas Kesehatan (Rp 4,5 miliar), RSUD Raja Ahmad Thabib (Rp 15 miliar), RSUD Engku Daud (Rp 4,1 miliar), BPBD (Rp 2,6 miliar), serta Bantuan keuangan kabupaten/kota (Rp 3,8 miliar). Selanjutnya, realokasi anggaran diperluas dengan total realokasi Rp 167 miliar hingga Rp 230 miliar, di mana sejumlah OPD seperti kesehatan dan rumah sakit rujukan mengalami penyesuaian pagu signifikan.

Meskipun jumlahnya cukup besar pada level provinsi, wawancara dengan pejabat perencanaan Korem 033/WP menunjukkan bahwa realisasi anggaran kontinjensi untuk kegiatan operasional satuan kewilayahan sangat terbatas. Korem dan Kodim sering memakai anggaran organik yang tidak fleksibel dan minim dukungan ekstra untuk kebutuhan seperti transportasi laut atau penyediaan posko isolasi mobile. Korem juga belum memiliki akses langsung terhadap dana BTT Pemprov, sehingga respons terhadap lonjakan kasus Covid-19 di pulau-pulau terpencil menjadi lamban.

Pendekatan anggaran masih bersifat reaktif dan kaku, berbeda dari prinsip anggaran fleksibel yang direkomendasikan oleh Maher dkk. (2020), yang menyatakan pentingnya sistem anggaran yang adaptif dan terawasi dengan baik untuk merespons krisis secara efektif. Dalam konteks Kepri, pendekatan seperti ini belum optimal diterapkan, walaupun pemerintah daerah telah melakukan refocusing berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan jangka panjang, Korem 033/WP mengusulkan penyusunan **Rencana Kontinjensi (Rentikon)** dalam rencana anggaran Kodam I/Bukit Barisan di tahun anggaran berikutnya. Rentikon ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pengeluaran khusus seperti belanja darurat Babinsa, pengadaan peralatan pendukung isolasi mandiri desa, pelatihan ketahanan pangan, serta pengawalan distribusi bantuan sosial di daerah pulau.

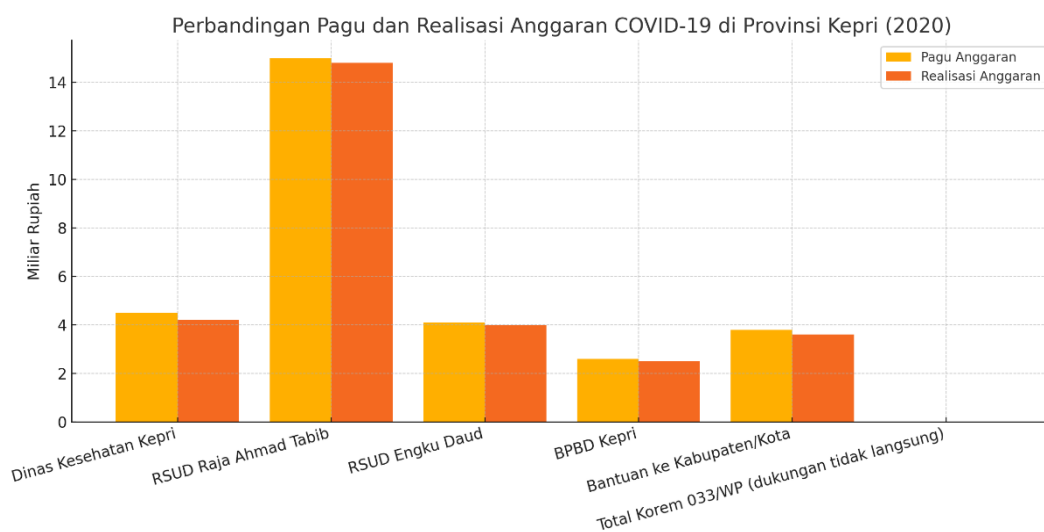
Di tingkat komunitas, sejumlah kampung di Kepri membentuk inisiatif Kampung Tangguh Mandiri (contoh: di Batam dan Bintan), menyusun fasilitas preventif seperti

tempat cuci tangan, portal karantina mikro, maupun perangkat sosialisasi. Namun, hingga pertengahan 2021, dukungan dana pemerintah daerah masih belum sampai— akibat keterbatasan mekanisme pendanaan terdesentralisasi dan prioritas anggaran Provinsi yang lebih banyak diarahkan ke fasilitas kesehatan formal.

Akibatnya, operasional kampung tangguh di wilayah Korem sering bergantung pada swadaya masyarakat dan bantuan Babinsa, tanpa bisa dioptimalkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya **penguatan tata kelola anggaran kontinjensi berbasis wilayah**, dengan model koordinatif antara Korem, Pemprov, dan desa/kelurahan, agar dapat merespons kebutuhan darurat secara lebih cepat dan efektif.

Berikut adalah visualisasi perbandingan pagu dan realisasi anggaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 untuk beberapa instansi utama, termasuk catatan bahwa Korem 033/Wira Pratama tidak secara langsung mendapatkan alokasi khusus, meskipun aktif mendukung operasional lapangan:

- Dinas Kesehatan Kepri dan dua RSUD menerima alokasi paling besar, dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi.
- Korem 033/WP menjalankan peran penting dalam logistik, pengamanan, dan edukasi tanpa memiliki pagu anggaran langsung dalam struktur APBD, melainkan bergantung pada alokasi Kodam dan dukungan organik.



Gambar 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran COVID-19 di Provinsi Kepri

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2022)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Covid-19 Provinsi Kepri 2020, BPK RI Perwakilan Kepri, Berita Resmi Pemerintah Provinsi Kepri dan OPD, presmedia.id serta DJPB Kemenkeu, *Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Kepri*, djpb.kemenkeu.go.id, Gambar 4.1 menampilkan data perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi belanja penanganan Covid-19 pada beberapa instansi utama di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Dari visualisasi tersebut, terlihat bahwa anggaran terbesar disalurkan kepada RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai rumah sakit rujukan provinsi (Rp 15 miliar), diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri (Rp 4,5 miliar), RSUD Engku Daud di Karimun (Rp 4,1 miliar), serta BPBD Kepri (Rp 2,6 miliar). Selain itu, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk penanganan pandemi juga dialokasikan sebesar Rp 3,8 miliar.

Realisasi dari pagu anggaran tersebut menunjukkan angka yang relatif tinggi, menandakan bahwa belanja publik dalam penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan dan logistik utama cukup berjalan secara administratif. Namun demikian, grafik juga mencatat bahwa Korem 033/Wira Pratama tidak menerima alokasi anggaran secara langsung dari APBD Kepri, sehingga seluruh kegiatan lapangan yang melibatkan aparat TNI seperti Babinsa dalam edukasi masyarakat, pengamanan distribusi vaksin, serta dukungan logistik darurat, dilaksanakan dengan menggunakan anggaran organik dan dukungan logistik pusat dari Kodam I/Bukit Barisan maupun BNPB.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam mekanisme pendanaan kontinjensi daerah, di mana peran vital satuan teritorial seperti Korem 033/WP belum sepenuhnya diakomodasi dalam skema pembiayaan daerah. Keterbatasan ini juga berdampak terhadap kelambatan tanggapan di lapangan, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil seperti Natuna dan Anambas, yang memiliki tantangan distribusi logistik lebih berat.

Kebutuhan akan sistem penganggaran kontinjensi yang responsif dan fleksibel semakin mendesak untuk menjamin efektivitas penanganan bencana non-alam di

daerah perbatasan dan kepulauan. Dalam konteks itu, pelibatan satuan teritorial seperti Korem 033/Wira Pratama perlu diatur secara eksplisit dalam kebijakan fiskal daerah untuk memastikan bahwa dukungan TNI dalam situasi darurat mendapat pendanaan yang layak dan tepat sasaran.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kondisi Penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dan Peran Korem 033/Wira Pratama sebagai berikut. Peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya pandemi. Di sejumlah wilayah seperti Batam, Tanjungpinang, dan Karimun, masih dijumpai aktivitas masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan kurang menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, tekanan ekonomi turut mendorong masyarakat untuk tetap beraktivitas meskipun dengan risiko terpapar COVID-19 yang tinggi.

Korem 033/Wira Pratama berperan sangat krusial dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020-2023. Dalam konteks ancaman nirmiliter yang dihadapi, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Korem bukan hanya sebatas peran keamanan, tetapi juga menampilkan fungsi sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Korem ini bergerak sebagai garda terdepan dalam mendukung implementasi strategi kesehatan masyarakat serta menjaga stabilitas wilayah yang terdiri dari kepulauan, yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri dalam koordinasi dan distribusi bantuan.

Selama masa pandemi, Korem 033/Wira Pratama menunjukkan kesiapsiagaan dan respons yang adaptif dalam mengatasi penyebaran virus dengan mengintegrasikan operasi kesehatan, pengawasan mobilitas masyarakat, serta membantu pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di berbagai wilayah pulau. Korem juga berkontribusi aktif dalam kegiatan vaksinasi massal, penyuluhan edukasi kesehatan, serta penanganan logistik medis yang sangat vital untuk daerah dengan karakter geografis

terpisah-pisah. Peran ini membantu mencegah overload sistem kesehatan dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menghadapi wabah.

Selain itu, Korem 033 berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan lembaga penanggulangan bencana sehingga pendekatan yang diambil menjadi komprehensif dan terpadu. Kekuatan militer yang dimiliki oleh Korem ini juga membantu mengatasi keterbatasan yang muncul akibat kondisi geografis dan disparitas fasilitas kesehatan di kepulauan, menjadikan Korem sebagai elemen penting dalam menjaga ketahanan sosial dan keamanan dalam masa krisis non-konvensional ini.

Dengan demikian, penanggulangan yang dilakukan oleh Korem 033/Wira Pratama mencerminkan suatu bentuk kekuatan ancaman nirmiliter yang bukan hanya berwujud ancaman fisik, tapi penanggulangannya juga menuntut kesiapsiagaan multidimensi yang menyatukan elemen pertahanan, kesehatan, dan sosial. Disesuaikan dengan teorikebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2014). Dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Korem 033/WP merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang menetapkan TNI sebagai salah satu yang membantu pemerintah menghadapi covid 19 dengan melakukan strategi dengan melakukan serbuan vaksinasi.

Korem 033/Wira Pratama tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai satuan pertahanan, tetapi juga mengambil peran sentral dalam serbuan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Peran ini sangat strategis karena Korem memanfaatkan kekuatan dan jaringan militernya untuk menjangkau wilayah kepulauan yang tersebar dan sulit diakses oleh fasilitas kesehatan konvensional.

Dengan keberadaan yang merata di berbagai pulau, Korem 033/Wira Pratama mampu mengkoordinasikan pelaksanaan vaksinasi massal secara cepat dan

terorganisir, sekaligus memastikan distribusi vaksin berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh Korem ini adalah perwujudan pendekatan multidimensi dalam menghadapi ancaman nirmiliter berupa pandemi, yang menuntut keterlibatan aparat militer dalam bidang kesehatan publik. Peran Korem dalam serbuan vaksinasi di Kepulauan Riau secara efektif mengintegrasikan kemampuan militer dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, sehingga menegaskan bahwa penanggulangan ancaman nirmiliter Covid-19 memerlukan sinergi antara aspek pertahanan dan kesehatan, terutama untuk wilayah geografis yang menantang seperti kepulauan.

4.5 Strategi Korem 033/Wira Pratama dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Strategi Korem 033/Wira Pratama (Korem 033/WP) dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dianalisis menggunakan kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) serta strategi berdasarkan pendekatan *Ends-Ways-Means*.

1) Analisis Strategi Berdasarkan POAC

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan yang dilakukan oleh Korem 033/WP dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan langkah awal dari strategi sistematis berbasis OMSP. Perencanaan ini melibatkan pemetaan risiko berdasarkan data penyebaran kasus, letak geografis (wilayah kepulauan), serta kebutuhan logistik dan tenaga medis. Korem 033/WP menyusun rencana berbasis pendekatan **bottom-up**, di mana informasi dari satuan bawah seperti Kodim dan Koramil menjadi dasar keputusan tingkat komando Korem. Perencanaan berbasis instruksi Inpres No. 6 Tahun 2020, Perpres No. 8 Tahun 2021, serta UU No. 24 Tahun 2007 menjadi rujukan legal Korem dalam merumuskan strategi. Korem menyesuaikan SOP internal yang memungkinkan pengerahan pasukan Babinsa sebagai garda terdepan edukasi dan pemantauan protokol kesehatan di masyarakat.

Menurut Terry (2010), perencanaan adalah proses dasar dalam manajemen yang berfungsi untuk merumuskan tujuan serta strategi pencapaiannya. Dalam konteks ini, Korem merespons ancaman non-tradisional berupa pandemi, dengan menyelaraskan rencana bersama pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Selain itu, perencanaan juga melibatkan pembentukan struktur gugus tugas bersama. Pemerintah Provinsi Kepri membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di mana Korem 033/WP menjadi unsur penting dalam subsatgas pengamanan dan logistik.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur komando berbasis wilayah, memanfaatkan keberadaan Kodim, Koramil, dan Babinsa secara optimal. Korem 033/WP membentuk pusat komando wilayah (Puskodal) untuk mengintegrasikan data kasus, distribusi logistik, dan pelaporan dari satuan bawah. Babinsa diberikan peran penting sebagai ujung tombak komunikasi sosial dan pelaksana PPKM mikro. Kolaborasi intensif dijalankan bersama Dinas Kesehatan, BPBD, Polri, Satpol PP, RSUD, serta lembaga swasta yang terlibat dalam pendistribusian bantuan dan vaksinasi.

Kegiatan pengorganisasian meliputi pembagian peran di antara unit-unit TNI, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), satuan kesehatan TNI, serta Koramil di wilayah kepulauan terpencil. Korem 033/WP menerapkan sistem pengorganisasian berbasis teritorial yang adaptif terhadap topografi Kepri. Wilayah ini terdiri dari ribuan pulau, sehingga memerlukan pendekatan fleksibel berbasis pulau dan pelabuhan. Menurut Terry (2010), organizing berarti menentukan struktur, fungsi dan otoritas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Korem 033/WP secara strategis mengarahkan Babinsa sebagai *agent of change* di tingkat desa untuk melaksanakan komunikasi sosial, edukasi protokol kesehatan, dan pendampingan masyarakat dalam vaksinasi.

Pengorganisasian juga mencakup penempatan personel kesehatan TNI di rumah sakit lapangan, pelabuhan, dan bandara. Kolaborasi ini didukung oleh komando

terpusat dan sinergi antar lembaga, seperti Polri, Imigrasi, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan strategi mencakup kegiatan operasi edukatif, pengamanan distribusi logistik, vaksinasi massal, dan pendampingan protokol kesehatan. Babinsa dikerahkan untuk patroli di kawasan rawan pelanggaran prokes, menyampaikan informasi di desa-desa pesisir, dan menjadi fasilitator vaksinasi lokal. Selain itu, Korem juga membentuk posko terpadu di titik-titik strategis dan melibatkan tokoh masyarakat dalam program kampung tangguh untuk membangun ketahanan sosial lokal. Pendekatan komunikasi sosial menjadi modal utama dalam menyukseskan pelaksanaan strategi ini.

Pelaksanaan strategi melibatkan kegiatan operasional secara langsung di lapangan. Korem 033/WP mengaktifkan sejumlah operasi, seperti:

- a. Edukasi masyarakat melalui patroli, razia masker, dan sosialisasi melalui media sosial.
- b. Penegakan protokol kesehatan secara persuasif.
- c. Pelibatan Babinsa dalam mendampingi pelaksanaan PPKM mikro di desa-desa.
- d. Distribusi bantuan logistik dan sembako ke daerah terdampak.

Pelaksanaan ini sejalan dengan teori *actuating* menurut Terry (2010), yakni menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja sesuai dengan peranannya demi mencapai tujuan. Dalam konteks ini, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat terbukti memperkuat legitimasi sosial TNI di masyarakat.

e. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut Terry (2010), *controlling* adalah proses untuk memastikan bahwa segala kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Korem melakukan kontrol dengan cara membangun posko terpadu di titik masuk strategis (pelabuhan dan bandara) serta pelaporan digital melalui sistem informasi kesehatan dan surveilans epidemiologi yang terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pengawasan dilakukan melalui sistem pelaporan zonasi risiko, pemantauan harian di Puskodal, dan supervisi langsung ke satuan jajaran. Data harian dikompilasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis seperti alokasi bantuan dan prioritas vaksinasi. Kontrol internal dilakukan melalui audit pelaksanaan tugas, evaluasi capaian sasaran, dan pelibatan Korem dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama Pemprov dan Satgas daerah. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pelaporan berjenjang dari tingkat Kodim ke Korem. Korem 033/WP melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas vaksinasi, kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, serta kesiapan rumah sakit TNI sebagai bagian dari kapasitas cadangan layanan kesehatan daerah.

2) Analisis Strategi Berdasarkan Teori Ends-Ways-Means

Teori strategi dengan model *ends-ways-means* digunakan untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Menurut Gray (2010), strategi adalah "*calculated relationship between ends, ways, and means.*"

a. Ends (Tujuan Strategis)

Tujuan strategis Korem 033/WP adalah memastikan stabilitas sosial, keamanan wilayah, dan mendukung pemulihan kesehatan masyarakat dalam konteks OMSP. Tujuan ini juga mengarah pada keberlangsungan fungsi pertahanan nirmiliter di masa krisis. Secara spesifik, sasaran strategis meliputi: menekan angka penularan Covid-19, memperluas cakupan vaksinasi, menjaga ketertiban wilayah, dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat Kepri. Tujuan ini merupakan manifestasi OMSP sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tujuan ini sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam **UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**, serta **UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI**, yang menegaskan bahwa OMSP termasuk kegiatan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana non-alam.

b. Ways (Cara/Strategi)

Strategi yang diterapkan Korem 033/WP meliputi pendidikan SDM, distribusi logistik medis, pemberdayaan Babinsa, operasi sosial dan vaksinasi, serta program ketahanan pangan. Korem mengedepankan sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi teritorial. Upaya ini dikemas dalam program kerja OMSP yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam membangun daya tahan wilayah dari pandemi. Strategi utama Korem 033/WP meliputi:

a) Strategi Hukum, Komando, dan Koordinasi.

Dalam konteks penanggulangan pandemi Covid-19, pelibatan Korem 033/Wira Pratama (WP) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya berbasis pada kecepatan dan kapasitas sumber daya, tetapi juga pada keabsahan hukum dan efektivitas sistem komando yang terintegrasi. Strategi ini merujuk pada pemenuhan prinsip-prinsip dalam sistem C3I (*Command, Control, Communication, and Information*), yang merupakan elemen kunci dalam operasi militer termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sistem ini memungkinkan integrasi lintas satuan, pengambilan keputusan yang cepat, serta penyaluran informasi yang akurat dan real-time dalam situasi darurat atau kontingensi.

- (a) Legalitas Tugas TNI: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan peran TNI dalam mendukung upaya penanggulangan bencana; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang mengatur tentang OMSP termasuk dukungan TNI terhadap pemulihan sosial dalam kondisi bencana non-alam; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang menugaskan TNI untuk membantu Pemda dalam penegakan disiplin dan protokol kesehatan Covid-19. UU dan Peraturan ini memberi legitimasi dalam OMSP.
- (b) Pembentukan Gugus Tugas & Komando Wilayah: Dalam mendukung efektivitas penanganan pandemi, Korem 033/WP membentuk **Pusat Komando Wilayah (Puskodal)** yang bertugas sebagai simpul koordinasi

strategis antara Kodim, Koramil, Babinsa, dan pemerintah daerah. Puskodal ini dilengkapi dengan sistem pelaporan berbasis harian dan zonasi risiko, yang merupakan penerapan nyata dari **sistem C3I**. Keberadaan Puskodal ini memungkinkan Korem 033/WP menjalankan fungsi C3I secara efisien, terutama dalam hal komando tanggap darurat di wilayah kepulauan dengan tantangan logistik dan komunikasi yang tinggi seperti di Kepri. Korem aktif dalam Gugus Tugas COVID-19 Kepri dan membentuk Puskodal terintegrasi untuk komando dan kontrol wilayah.

- (c) Sinergi Antar Lembaga: Kolaborasi erat dengan Dinkes, BPBD, Polri, Satpol PP, dan Pemda guna memastikan satu kesatuan tindakan. Efektivitas komando dan koordinasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan TNI untuk **berkoordinasi dengan aktor sipil secara sinergis**. Hal ini sejalan dengan prinsip *Civil-Military Coordination (CIMIC)* sebagaimana dikembangkan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)*. Dalam dokumen "*Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets (MCDA) in Disaster Relief*" (Oslo Guidelines), CIMIC dimaknai sebagai mekanisme dialog dan interaksi antara aktor militer dan sipil untuk mencapai tujuan bersama dalam situasi darurat kemanusiaan.

Dalam konteks Korem 033/WP, bentuk nyata dari **implementasi CIMIC** meliputi: Penugasan perwakilan TNI dalam struktur Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepri; Pelibatan Babinsa dalam pemetaan dan pengawasan zona risiko; Penggunaan fasilitas militer sebagai rumah sakit darurat dan gudang logistic; Kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program vaksinasi, pembatasan sosial, serta operasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan **doktrin TNI AD** tentang peran kewilayahan, di mana satuan teritorial seperti Korem bertugas membina dan memberdayakan potensi pertahanan di wilayah tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Korem berperan sebagai penghubung antara kekuatan militer dan

otoritas sipil lokal untuk meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi bencana.

b) Strategi Medis dan Infrastruktur

Keberhasilan operasi militer dalam OMSP ditentukan oleh kejelasan sasaran taktis yang mendukung tujuan strategis nasional. Korem 033/WP secara spesifik menetapkan sasaran operasi meliputi peningkatan cakupan vaksinasi, pendampingan distribusi logistik kesehatan, dan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Fokus ini sejalan dengan strategi nasional dalam menekan angka penularan dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Seluruh sasaran tersebut dijabarkan dalam rencana aksi Korem bersama Kodim dan Koramil jajaran, termasuk dalam mekanisme pelaporan zonasi risiko dan intervensi wilayah berbasis data kasus harian.

- 1) Pemanfaatan Fasilitas Strategis: Gedung milik TNI dan Pemda digunakan sebagai RS darurat, tempat isolasi pasien, pusat vaksinasi, dan gudang logistik.
- 2) Penguatan Sarpras Medis: Dukungan pembangunan RS pembantu TNI, pengadaan APD, test kit, peralatan disinfektan di Natuna, Anambas, dan Bintan.
- 3) Kolaborasi Layanan Kesehatan: Korem bekerja sama dengan RS pemerintah (RSUP RAT, RS BP Batam) dan RS TNI AL sebagai RS rujukan COVID-19.

c) Strategi Vaksinasi dan Tracing

Salah satu kekuatan utama dalam strategi Korem 033/WP adalah kemampuannya dalam membangun sinergi operasional dengan berbagai aktor pemerintahan dan masyarakat. Kolaborasi erat terjalin antara Korem dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, BPBD, RSUD daerah, Polri, Satpol PP, serta jajaran Pemda di Batam, Bintan, Natuna, Anambas, dan Lingga. Melalui mekanisme gugus tugas dan komite penanganan Covid-19 tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, Korem menempatkan personel dan infrastruktur militer untuk mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta implementasi PPKM mikro. Kolaborasi ini menjaga kesatuan tindakan, memperkuat efektivitas kebijakan, dan membangun kepercayaan publik.

- 1) Vaksinasi Terintegrasi: Korem mendukung vaksinasi massal di Koramil, desa, tempat ibadah, bekerja sama dengan Pemprov dan instansi kesehatan.
- 2) Tenaga Vaksinator TNI: Penugasan personel kesehatan TNI sebagai vaksinator dan pengaman logistik vaksinasi.
- 3) Testing & Tracing Wilayah Rawan: Korem kerahkan Babinsa dan tenaga relawan untuk tracing dan testing di zona padat dan zona merah.

Sebagai salah satu tonggak keberhasilan Korem 033/Wira Pratama (Korem 033/WP) dalam penanganan pandemi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), program vaksinasi massal menjadi strategi utama yang menunjukkan efektivitas tinggi. Korem 033/WP, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Dinas Kesehatan, serta jajaran Kodim dan Koramil, berhasil melaksanakan vaksinasi hingga ke tingkat desa dan pulau terpencil. Fasilitasi pos vaksin di Koramil, balai desa, dan tempat ibadah menjangkau wilayah dengan akses terbatas.

Keterlibatan personel kesehatan TNI sebagai vaksinator yang telah mendapatkan pelatihan turut mempercepat capaian vaksinasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, distribusi vaksin dilakukan dengan moda laut dan udara, menunjukkan kemampuan Korem dalam mengatasi kendala geografis. Dukungan ini berdampak pada percepatan vaksinasi, yang pada akhir 2021 mampu menekan positivity rate Kepri yang sempat mencapai lebih dari 10% selama bulan Juli–Agustus 2021.

Prajurit Korem 033/WP, khususnya Babinsa, menerima pelatihan luar sekolah (in-service training) dengan materi seperti pendataan kontak erat, edukasi

protokol kesehatan, dan pendampingan sosial. Pelatihan ini penting mengingat peran Babinsa sebagai aktor utama di lapangan, terutama di wilayah blank spot digital atau daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan konsep *Civil-Military Coordination (CIMIC)* dari PBB, di mana militer berperan mendukung struktur sipil dalam kondisi darurat melalui integrasi koordinatif yang fleksibel dan responsif.

d) Strategi Edukasi dan Operasi Teritorial

Strategi pengurangan risiko dilaksanakan Korem melalui penyediaan pengamanan distribusi bantuan dan vaksin, pendirian posko terpadu di titik strategis, serta penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan militer dan masyarakat. Posko terpadu berfungsi sebagai pusat logistik, informasi, dan layanan darurat, terutama di wilayah pulau-pulau terluar yang aksesnya terbatas. Melalui keterlibatan aktif Babinsa di tingkat desa dan kelurahan, Korem turut mengarahkan pendampingan tracing, pendataan warga kontak erat, hingga pengawasan pelaksanaan isolasi mandiri. Strategi ini terbukti mampu menekan penyebaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran TNI di masa krisis.

- 1) Peningkatan SDM Operasional: Pelatihan luar sekolah bagi Babinsa tentang pendampingan masyarakat, edukasi prokes, dan pendataan kontak.
- 2) Operasi Teritorial Edukatif: Babinsa aktif dalam patroli, penyuluhan, dan sosialisasi protokol kesehatan dengan pendekatan lokal berbasis tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Tokoh Pemuda).
- 3) PPKM Mikro dan Sosialisasi Massal: Korem mengawal pelaksanaan PSBB dan PPKM mikro di zona rawan seperti Batam, Bintan, dan pelabuhan-bandara.

e) Strategi Sosial-Ekonomi dan Ketahanan Masyarakat

Sebagai elemen pengendali operasi, Korem 033/WP membentuk sistem pusat komando wilayah (Puskodal) yang terhubung langsung dengan satuan di bawahnya, yaitu Kodim, Koramil, hingga Babinsa. Puskodal ini dilengkapi dengan sistem pelaporan harian berbasis zonasi risiko, yang mengintegrasikan data epidemiologi dan kebutuhan logistik di setiap daerah. Dengan mekanisme ini, Korem dapat mendukung pengambilan keputusan cepat dalam alokasi bantuan, penetapan zona merah, dan pembentukan posko baru sesuai kondisi dinamis di lapangan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip efektivitas komando dan kontrol dalam operasi militer terpadu.

- 1) Distribusi Bantuan Sosial: Korem melibatkan Babinsa untuk membantu pengamanan dan distribusi bansos, sembako, dan bantuan APD ke pulau terpencil.
- 2) Penguatan Ketahanan Pangan: Dukungan urban farming, lumbung pangan kampung, dan program ekonomi lokal untuk nelayan dan masyarakat pesisir.
- 3) Pemetaan Zona Risiko dan Pelaporan: Pusat komando wilayah Korem menyiapkan sistem pelaporan berbasis zonasi untuk mendukung respons cepat dan alokasi sumber daya.

Strategi sosial-ekonomi Korem 033/WP ditunjukkan melalui distribusi bantuan sosial secara masif ke masyarakat pesisir dan kepulauan. Bantuan mencakup sembako, vitamin, masker, hingga alat kesehatan yang didistribusikan ke wilayah-wilayah seperti Pulau Midai, Subi, Tambelan, dan Anambas. Di samping itu, program ketahanan pangan melalui urban farming dan lumbung pangan kampung memperlihatkan pendekatan berkelanjutan yang mendukung ketahanan masyarakat pasca pandemic.

Dengan pendekatan di atas, strategi Korem 033/Wira Pratama tidak hanya berorientasi jangka pendek (penanggulangan) tetapi juga memiliki dimensi jangka

menengah (pemulihan sosial-ekonomi) serta berakar pada pendekatan teritorial berbasis lokalitas dan kultur masyarakat Kepri. Strategi ini selaras dengan doktrin OMSP TNI dan prinsip dasar manajemen krisis terpadu.

c. Means (Sumber Daya)

Korem memanfaatkan SDM militer termasuk Babinsa dan tenaga kesehatan TNI, fasilitas seperti Rumkitban Batam dan rumah sakit pendamping, sarana komunikasi wilayah, dan bantuan logistik dari pemerintah pusat dan daerah. Pusat Komando Wilayah (Puskodal) dan jaringan Kodim/Koramil menjadi alat manajemen operasional Korem dalam menggerakkan seluruh potensi satuan dan masyarakat. Sumber daya yang digunakan mencakup:

- a) Personel TNI, terutama Babinsa, tim medis militer, dan tim logistik.
- b) Fasilitas kesehatan milik TNI seperti Rumkitban Batam, Natuna, dan Tanjungpinang.
- c) Infrastruktur digital dan komunikasi lapangan.
- d) Dukungan anggaran dari refocusing belanja pertahanan serta bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi dan Satgas Nasional.

Penggunaan sumber daya ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kepri yang kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga strategi berbasis pulau menjadi sangat relevan.

Dikaitkan pada teori kebijakan, Korem 033/Wira Pratama dalam menjalankan strategi serbuan vaksinasi menghadapi pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau berintegrasi erat dengan kebijakan dan arahan yang diberikan kepada TNI oleh pemerintah pusat. TNI, termasuk Korem 033, diberikan mandat untuk mendukung percepatan penanggulangan pandemi melalui kegiatan non-militer yang bersifat sosial dan kemanusiaan, menyelaraskan misi pertahanan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks ini, strategi Korem 033/Wira Pratama berfokus pada implementasi kebijakan TNI yang menekankan peran aktif TNI dalam pelayanan vaksinasi massal

dan penguatan sistem kesehatan di wilayah operasi. Kebijakan tersebut mengarahkan TNI untuk bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan lembaga terkait agar distribusi dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan secara efektif di wilayah geografis yang menantang seperti Kepulauan Riau. Korem 033 melaksanakan serbuan vaksinasi dengan mengoptimalkan jaringan dan sumber daya militernya, mulai dari pengamanan distribusi vaksin, pendirian pos-pos vaksinasi di titik-titik strategis, sampai dengan edukasi langsung ke masyarakat. Pendekatan ini sangat penting untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah kepulauan.

Selain itu, kebijakan TNI memberikan mandat agar upaya penanggulangan pandemi tidak hanya terfokus pada aspek kesehatan saja, tetapi juga menyertakan pendekatan keamanan dan sosial yang menjaga stabilitas wilayah. Hal ini tercermin dari peran Korem 033 dalam memastikan tata tertib dan keamanan selama kegiatan vaksinasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dengan demikian, strategi Korem 033 dalam serbuan vaksinasi adalah bagian integral dari kebijakan TNI yang dirancang untuk menjawab ancaman nirmiliter pandemi Covid-19 secara komprehensif menggabungkan kekuatan militer dengan pendekatan kesehatan masyarakat dan sosial demi menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah Kepulauan Riau.

Sedangkan, Dalam konteks teori Manajemen Strategik, yang didefinisikan sebagai ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi, peran Korem 033/Wira Pratama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Pertama, pada tahap perumusan strategi, Korem 033 menyelaraskan mandatnya dengan kebijakan TNI dan pemerintah pusat dalam penanggulangan pandemi. Fokus strategi serbuan vaksinasi, penguatan protokol kesehatan, dan penanganan distribusi logistik vaksin dirumuskan berdasarkan analisis situasi unik wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan pendekatan khusus. Ini menampilkan kesadaran strategis pada pemetaan ancaman nirmiliter berupa

pandemi, yang mengharuskan koordinasi lintas fungsi – kesehatan, keamanan, logistik, dan komunikasi publik.

- b. Kedua, pada tahap pelaksanaan strategi, Korem menunjukkan kemampuan mengintegrasikan berbagai fungsi lintas sektor, seperti operasi militer yang dilengkapi dengan kegiatan kemanusiaan (serbuan vaksin), pengamanan distribusi vaksin, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan pemda dan dinas kesehatan. Pelaksanaan ini mencerminkan efektivitas manajerial dalam menggerakkan sumber daya, termasuk personel militer, fasilitas, dan kapabilitas logistik, menuju tujuan bersama yaitu mengendalikan penyebaran Covid-19 dan membangun herd immunity secara cepat dan merata.
- c. Ketiga, dalam hal evaluasi dan pengendalian, Korem juga harus melakukan monitoring efektivitas program vaksinasi, respons masyarakat, dan tantangan lapangan untuk melakukan adaptasi kebijakan dan strategi bila diperlukan. Misalnya, menyesuaikan metode distribusi vaksin di pulau-pulau tertentu atau meningkatkan kegiatan edukasi jika terjadi resistensi masyarakat. Hal ini menandakan kontinuum manajerial yang penting untuk memastikan strategi yang diambil tetap relevan dan berdampak optimal.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan teori manajemen strategik menggarisbawahi bahwa keberhasilan Korem 033/Wira Pratama dalam penanggulangan pandemi tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tapi pada kemampuan mereka menjalankan manajemen strategik secara menyeluruh: merumuskan strategi yang tepat berbasis situasi, melaksanakan eksekusi lintas fungsi secara terintegrasi, dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Kegiatan Korem 033/WP juga sejalan dengan teori ancaman non-tradisional oleh Barry Buzan dan konsep human security WHO, di mana ancaman pandemi dipandang sebagai tantangan lintas sektor yang memerlukan respons adaptif, kolaboratif, dan berbasis kapasitas wilayah. Dalam konteks ini, Korem 033/Wira Pratama mengimplementasikan pendekatan multidimensi dengan menggabungkan peran

militer, kesehatan, sosial, dan pemerintahan untuk menghadapi ancaman yang bersifat nirmiliter ini. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek pertahanan fisik, tetapi juga memperhatikan keamanan manusia secara menyeluruh, meliputi kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Dengan demikian, respons Korem 033 memperlihatkan kemampuan adaptasi strategis yang sejalan dengan paradigma keamanan manusia yang mengedepankan perlindungan terhadap ancaman yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan memerlukan sinergi berbagai elemen negara dan masyarakat secara terpadu. Korem 033/WP dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjalankan strategi yang sangat sesuai dengan pendekatan *Ends, Means, and Ways* dalam manajemen strategik, serta paralel dengan teori ancaman non-tradisional oleh Barry Buzan dan konsep human security WHO.

Aspek ends yaitu Tujuan utama Korem 033/Wira Pratama adalah mengendalikan dan meminimalkan penyebaran Covid-19 di wilayah Kepulauan Riau sekaligus memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat melalui serbuan vaksinasi massal dan edukasi publik. Tujuan ini sejalan dengan konsep human security WHO yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai elemen penting dalam keberlangsungan keamanan manusia secara menyeluruh. Aspek means, Sarana yang digunakan mencakup kekuatan dan kapabilitas militer Korem 033/WP, dukungan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang terlatih, logistik vaksin, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan elemen masyarakat. Pendekatan sistemik ini juga merefleksikan pandangan Barry Buzan tentang ancaman non-tradisional yang memerlukan respon adaptif dan berbasis kapasitas wilayah, sehingga sarana yang dipakai harus lintas fungsi dan melibatkan berbagai aspek.

Sedangkan, ways atau cara metode yang ditempuh adalah integrasi operasi militer dengan kegiatan kemanusiaan seperti serbuan vaksinasi di berbagai pulau, pengamanan distribusi vaksin, edukasi intensif untuk mengatasi keraguan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Cara ini memperlihatkan fleksibilitas dan inovasi dalam pelaksanaan strategi yang tidak hanya

memanfaatkan kekuatan fisik tapi juga kekuatan sosial dan komunikasi publik. Pendekatan strategis ini memperlihatkan bahwa Korem 033/Wira Pratama mampu mengadaptasi peranannya dalam menghadapi ancaman non-tradisional berupa pandemi dengan memadukan tujuan yang jelas (ends), memanfaatkan sarana yang optimal dan relevan (means), serta melaksanakan metode yang komprehensif dan adaptif (ways). Hal ini juga menjawab kebutuhan keamanan manusia yang tidak hanya terbatas pada aspek militer namun juga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam konteks pandemi.

Strategi ini mencerminkan kemampuan Korem 033/WP berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah penyakit menular sebagai ancaman nirmiliter, dengan menjaga keseimbangan antara tugas pertahanan militer dan tanggung jawab sosial kemanusiaan yang menjadi kebutuhan mendesak saat pandemi. Penekanan pada sinergi dengan pemerintah daerah dan elemen masyarakat mencerminkan pendekatan kolaboratif yang efektif di wilayah berkarakter geografis kepulauan seperti Kepulauan Riau. Strategi Korem 033/Wira Pratama (WP) dalam menghadapi ancaman nirmiliter berupa wabah penyakit menular di Provinsi Kepulauan Riau (studi kasus penanggulangan Covid-19 kurun waktu 2020-2023) secara khusus mengintegrasikan mandat dan kebijakan TNI yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan pendekatan operasi militer yang dipadukan aspek kemanusiaan dan sosial. Strategi Korem 033/WP berfokus untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 secara efektif di wilayah Kepulauan Riau, dengan menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Hal ini dilakukan melalui serbuan vaksinasi massal dan kegiatan edukasi kesehatan masyarakat, yang merupakan respons adaptif terhadap ancaman nirmiliter berupa pandemi.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Ancaman Covid-19 di wilyah Provinsi Kepulauan Riau.

Ancaman Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan sebagai ancaman non-tradisional yang berdampak besar terhadap kesehatan, stabilitas

sosial, dan pertahanan wilayah, terutama karena posisi Kepri sebagai wilayah perbatasan dan jalur pelayaran internasional. Tingginya mobilitas, ketimpangan infrastruktur kesehatan di wilayah 3T, dan tantangan distribusi logistik memperparah kerentanan daerah. Namun, dengan sinergi lintas sektor dan peran aktif Korem 033/Wira Pratama dalam OMSP seperti vaksinasi, edukasi masyarakat, dan pengamanan wilayah Kepri mampu menekan laju penyebaran dan mencapai cakupan vaksinasi tertinggi secara nasional, menjadikannya contoh keberhasilan respons wilayah kepulauan dalam menghadapi pandemi.

Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 hingga 2023 merupakan ancaman nirmiliter yang signifikan dan kompleks yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Ancaman ini bersifat non-fisik namun sangat berdampak besar pada kesehatan masyarakat, kestabilan sosial, dan perekonomian daerah yang sangat bergantung pada aktivitas laut, pelabuhan, dan perdagangan antar pulau. Wabah ini menjadi pengingat pentingnya kesiapan sistem kesehatan dan kolaborasi multisektoral dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang bersifat non-tradisional. Korem 033/Wira Pratama berperan strategis sebagai penghubung kekuatan militer dan sosial kemanusiaan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan daerah.

b. Kondisi penanggulangan Korem 033/Wira Pratama menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Penanggulangan pandemi COVID-19 oleh Korem 033/Wira Pratama di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peran penting TNI dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam koordinasi lintas sektor, distribusi logistik, edukasi masyarakat, dan pengamanan wilayah perbatasan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan serius, antara lain terbatasnya pelatihan teknis bagi personel, lemahnya integrasi data, kurangnya dukungan anggaran langsung, serta keterbatasan sarana kesehatan di daerah 3T. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi telah dijalankan secara aktif,

efektivitas penanganan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan sistemik yang lebih terencana, berbasis data, dan didukung regulasi serta anggaran yang responsif.

Kondisi penanggulangan yang dilakukan oleh Korem 033/Wira Pratama dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan *respons yang cepat, terorganisir, dan terintegrasi* dengan kebijakan pemerintah dan TNI. Korem 033/WP memanfaatkan keunggulan sumber daya militer untuk mendukung percepatan vaksinasi, penguatan protokol kesehatan, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Akan tetapi, Meski hambatan banyak, keberadaan Korem 033 sebagai garda terdepan memberikan kekuatan stabilitas keamanan dan dukungan logistik yang sangat vital dalam menjalankan operasi penanggulangan pandemi di wilayah yang kompleks ini.

c. Strategi Korem 033/Wira Pratama dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Strategi Korem 033/Wira Pratama dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dirancang secara sistematis dan responsif melalui pendekatan POAC dan Ends-Ways-Means. Korem 033/WP berhasil menyusun perencanaan terintegrasi, mengorganisasi komando wilayah secara adaptif, menggerakkan sumber daya melalui aksi edukatif dan operasional di lapangan, serta melakukan pengawasan berbasis sistem komando Puskodal. Strategi ini terbukti efektif dalam mendukung vaksinasi massal, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta memperkuat ketahanan wilayah di daerah kepulauan dan perbatasan. Dukungan SDM Babinsa, sinergi antar lembaga, dan pemanfaatan sarana militer menjadi faktor kunci keberhasilan strategi ini yang tidak hanya menanggulangi pandemi, tetapi juga memperkuat kapasitas pertahanan nirmiliter secara berkelanjutan.

Korem 033/WP mengadopsi strategi yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman nirmiliter berupa pandemi, dengan:

- a) Tujuan (*Ends*) yang jelas, yakni mengendalikan penyebaran Covid-19 dan menjaga stabilitas sosial serta keamanan wilayah Kepulauan Riau melalui upaya vaksinasi massal dan edukasi kesehatan masyarakat.
- b) Sarana dan Sumber Daya (*Means*) yang optimal, berupa personel militer yang memiliki kapabilitas logistik dan mobilitas tinggi, fasilitas kesehatan yang didukung pemerintah daerah, serta kolaborasi antar lintas sektor untuk menjamin distribusi dan pelaksanaan program dengan efektif.
- c) Metode Pelaksanaan (*Ways*) yang adaptif dan inovatif, meliputi operasi serbuan vaksinasi di berbagai pulau terpencil, pengamanan distribusi vaksin, kampanye informasi yang intensif untuk mengatasi keraguan masyarakat, serta monitoring berkelanjutan demi evaluasi dan penyesuaian strategi secara dinamis.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

a. Kementerian Pertahanan (Kemhan)

- 1) Menyusun kerangka kontinjensi nasional untuk ancaman non-tradisional, dengan melibatkan Korem dan pemda.
- 2) Mengalokasikan anggaran tetap untuk OMSP, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan.
- 3) Mengintegrasikan strategi OMSP berbasis POAC dan Ends-Ways-Means ke dalam Renstra Pertahanan.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan terpadu tentang ketahanan kesehatan masyarakat dan manajemen bencana non-alam bagi personel TNI.

b. Mabes TNI

- 1) Menyusun SOP nasional OMSP untuk pandemi, yang adaptif terhadap karakteristik wilayah seperti kepulauan.

- 2) Memperkuat pelatihan dan digitalisasi sistem pelaporan berbasis satuan teritorial (Babinsa-Kodim-Korem).
- 3) Mengalokasikan anggaran darurat organik yang fleksibel untuk operasi tanggap krisis kesehatan masyarakat.
- 4) Menstandarkan pembentukan Puskodal dan sistem kontrol terintegrasi sebagai bagian strategi komando darurat.

c. **Mabes TNI AD**

- 1) Memperkuat kurikulum pendidikan TNI dengan materi penanggulangan bencana non-alam dan pemulihan sosial.
- 2) Menyiapkan unit respons cepat Zeni dan Kesehatan di wilayah rentan dan 3T.
- 3) Meningkatkan fungsi Rumkitban dan Poskes Kodim sebagai RS pendukung darurat.
- 4) Melaksanakan pelatihan Babinsa secara nasional tentang vaksinasi, tracing, komunikasi risiko, dan pemanfaatan IT dalam operasi sosial.

d. **Kementerian Kesehatan**

- 1) Menyediakan tenaga vaksinator pelengkap dan pelatihan teknis bagi personel Babinsa yang bertugas di daerah terpencil.
- 2) Mengintegrasikan data vaksinasi dan tracing Korem/TNI ke dalam dashboard nasional Kemenkes.
- 3) Menyusun modul kolaborasi sipil-militer dalam respons kesehatan masyarakat berbasis percontohan Korem 033/WP di wilayah perbatasan.

e. **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

- 1) Menerbitkan Perda Penanggulangan Bencana Non-Alam yang mengatur peran TNI secara eksplisit.

- 2) Mengintegrasikan Babinsa dalam struktur gugus tugas dan program ketahanan wilayah berbasis desa.
- 3) Menyediakan akses anggaran responsif kepada Korem/Kodim untuk logistik, vaksinasi, dan operasi sosial.
- 4) Membangun sistem penganggaran terpadu dengan melibatkan TNI sebagai mitra strategis penanggulangan bencana.

f. BNPB dan BPBD Provinsi Kepri

- 1) Meningkatkan koordinasi operasional dan logistik dengan Korem/Kodim secara real time selama pandemi dan bencana non-alam.
- 2) Memfasilitasi akses pelatihan kebencanaan lintas sektor bersama TNI dan aparat desa.
- 3) Mengembangkan mekanisme pelaporan terintegrasi dari posko desa ke pusat kendali provinsi dan Korem.

g. Kodam I/Bukit Barisan

- 1) Menyusun Rencana Kontinjensi Pandemi (Rentikon) yang detail untuk wilayah Korem 033/WP.
- 2) Mendorong pilot project integrasi C3I dan strategi OMSP di daerah kepulauan.
- 3) Menjamin dukungan logistik dan transportasi laut untuk daerah 3T bersama Pemprov dan BNPB.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi Babinsa wilayah kepulauan agar mampu menjalankan fungsi multifungsi di lapangan.

h. Kodim Jajaran Korem 033/WP

- 1) Mengembangkan dashboard pelaporan lokal terkait vaksinasi, bantuan sosial, dan zonasi risiko.

- 2) Memperkuat ketahanan pangan komunitas lewat urban farming dan lumbung pangan kampung.
- 3) Meningkatkan literasi digital Babinsa dan membangun posko terpadu berkelanjutan di daerah rawan.
- 4) Menjadikan Babinsa sebagai aktor utama pemberdayaan sosial-ekonomi pasca pandemi melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan puskesmas.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, O. M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global (Kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin Tahir. (2011) *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. (2013). *Strategic Management*. Jakarta: Rajawali Persada
- Boeree, George. (2010). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Prismashopie
- David, Fred R. (2011). *Strategic Management Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, Fred R dan David, F. R. (2016). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing (15th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hill, Michael & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. SAGE Publications.
- Hubeis, M. (2014). *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kerr, P. (2010). 'Human Security', dalam A. Collins, ed., *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford University Press
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexi J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.

- Rahman, A dan Radjab E. (2017). "Manajemen Strategi." Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rangkuti, F. (2013). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu, D. J. (2015). Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sholichin, Abdul Wahab. (2008). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufiqrokman. (2016). "Manajemen Strategi." Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Terry, George R. (2010). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Pertama). Yogyakarta: CAPS.

ARTIKEL/ JURNAL :

- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. National Research Tomsk State University, Universitas Mercu Buana
- Fitri, Aulia. (2020). Tantangan Pelibatan TNI Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020
- Maharani, Curie & Novi Jauhari. (2020). "Prasyarat Lockdown dan Aspek Militer dalam Penanggulangan COVID-19". CSIS Commentaries, DMRU-023-ID.
- Malik, Abdul. (2016). "Penelitian Deskriptif Untuk Bidang Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Sosial-Budaya." Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Perdana, R. A. et.al. (2021). Kedudukan Lembaga Pertahanan Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Slamet Riyadi
- Purwoko, Djoko. (2021). Keterlibatan TNI Dalam Darurat Corona Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Jurnal Negara dan Keadilan Volume 10 Nomor 2 / Agustus 2021 p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801

- Rahmawati, E. (2017). Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah. SKRIPSI. Jurusan Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J*. 2020; published online February 11. DOI:10.1097/CM9.0000000000000722.
- Sari, M. I. et.al. (2020). The Role Of The Defense Institutions In Handling The Covid-19 Pandemic. The Habibie Center, Universitas Pertahanan
- Sukatri, A. et.al. (2021). Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 2, Nomor 5, Mei 2021 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
- WHO. 26 March (2020). Critical Preparedness. Readiness and Response Actions for Covid-19

PERATURAN dan DOKUMEN :

- Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2015). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementrian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

WEBSITE/ INTERNET :

- <https://corona.kepriprov.go.id/data.phtml> diakses pada 10 Maret 2021
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/23332451/komisi-i-sepakat-penambahananggaran-tni-rp-32-triliun-untukpenanganan> diakses 21 April 2021

Cancian, Mark F. (2020). "Use of Military Forces in the COVID-19 Emergency", 17 Maret 2020, <https://www.csis.org/analysis/use-military-forces-covid-19-emergency>, diakses 15 April 2022

<https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirus-usa-automakers/ford-gm-tesla-getting-go-ahead-to-make-ventilators-trump-idUSKBN2190Q6>, diakses 15 April 2020.